

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengacu pada Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pasal 2 ayat (2), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan. Jenjang perencanaan daerah terdiri dari perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah dan perencanaan tahunan. Ketentuan selanjutnya diatur dalam Undang – Undang nomor 23 tahun 2014 pasal 273 (2) dan (3) yang menyebutkan bahwa Rencana Strategis Perangkat Daerah dirumuskan ke dalam rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) dan digunakan sebagai bahan penyusunan Rancangan RKPD. RKPD dimaksud memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Pasal 13 Ayat (2) Renja Perangkat Daerah memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD. Dalam pasal 16 Ayat (2) menyatakan Penyusunan Renja Perangkat Daerah dilakukan dengan tahapan: a. persiapan penyusunan; b. penyusunan rancangan awal; c. penyusunan rancangan; d. pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah; e. perumusan rancangan akhir; dan f. penetapan. Dengan demikian, pernyataan tahapan penyusunan Renja PD

yang terdiri dari 3 (tiga) tahapan utama pada paragraph kedua supaya disempurnakan.

Berdasarkan Pasal 126 Penyusunan rancangan awal Renja Perangkat Daerah berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan. Setelah disusun berdasarkan tahapan dan tatacara, maka rancangan Renja Perangkat Daerah disempurnakan menjadi rancangan akhir Renja Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Wali Kota Blitar Nomor ... Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022

Sebagai dokumen perencanaan perangkat daerah, maka Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Blitar Tahun 2022 disusun dengan prinsip – prinsip sebagai berikut :

1. Berpedoman pada Renstra Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar Tahun 2021- 2026 yang bertujuan untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta perkiraan maju;
2. Berpedoman pada hasil evaluasi Renja Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar tahun 2021 yang bertujuan untuk memastikan bahwa rumusan kegiatan alternatif dan / atau kegiatan baru yang disusun dalam Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Blitar dilakukan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Blitar;
3. Memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi baik untuk tahun 2022 dan perkiraan maju tahun 2023;
4. Penyusunan Renja PD bukan merupakan kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD 2022, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD.

1.1.1 Keterkaitan antara Renja PD dengan RKPD

Sebagaimana diatur dalam peraturan perundang – undangan, penyusunan renja salah satunya berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Selain itu pasal 78 ayat 1 huruf (d)

Permendagri nomor 86 Tahun 2017 disebutkan bahwa penyusunan rancangan awal RKPD mencakup penelaahan rancangan awal Renja Perangkat Daerah. Ini artinya antara Renja dan RKPD merupakan satu entitas yang saling melengkapi dimana penyusunan Renja berpedoman pada RKPD, sementara penyusunan Ranwal RKPD mencakup penelaahan terhadap Ranwal Renja Perangkat Daerah. Oleh karena itu penyusunan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Blitar Tahun 2022 berpedoman kepada RKPD Kota Blitar tahun 2022.

1.1.2 Keterkaitan antara Renja PD dengan Renstra Perangkat Daerah

Selain berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dokumen Renja perangkat Daerah juga berpedoman pada Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra Perangkat Daerah). Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 tahun yang berhubungan dengan tugas pokok fungsi perangkat daerah serta disusun dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis. Dalam Permendagri nomor 87 Tahun 2017, disebutkan bahwa sasaran Renstra Perangkat Daerah dan sasaran Renja Perangkat Daerah, merupakan dasar penilaian sistem akuntabilitas kinerja instansi perangkat daerah. Ini artinya harus terdapat kesesuaian antara dokumen renstra dengan dokumen renja Perangkat Daerah. Oleh karena itu penyusunan renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Blitar tahun 2022 juga berpedoman pada Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar Tahun 2021 - 2026

1.1.3 Keterkaitan antara Renja PD dengan Renja Kementerian / Lembaga dan Renja Provinsi

Renja Kementerian/lembaga (Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Timur) tidak terkait secara langsung dalam proses penyusunan Renja PD, seperti halnya Renstra maupun RKPD. Namun Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Timur perlu ditelaah untuk mengetahui dan menganalisis sejauh mana program provinsi yang dapat berpengaruh langsung terhadap Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Blitar tahun 2022.

1.1.4 Renja dan Tindak lanjutnya dalam APBD

Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Blitar tahun 2022 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Blitar Tahun 2022. Sedangkan RKA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Blitar Kota Blitar Tahun 2022 merupakan salah satu dasar yang digunakan dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) yang kemudian disahkan sebagai dokumen APBD Kota Blitar. Oleh karena itu Renja merupakan salah satu dokumen penting untuk kemudian ditindaklanjuti dalam APBD Kota Blitar Tahun 2022.

1.2 Landasan Hukum

Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Blitar Tahun 2022 berdasarkan pada :

1. Undang – undang nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 1540);
7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021 (Berita Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 470) ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 nomor 590);
9. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Blitar tahun 2005 – 2025;
10. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 4);
11. Peraturan Walikota Blitar Nomor 39 Tahun 2014 tentang Tugas Pokok Fungsi Dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar;
12. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Blitar tahun 2021-2026;
13. Peraturan Walikota Blitar Nomor 39 tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Blitar Tahun 2022 (Berita Daerah Kota Blitar tahun 2021 nomor 39).

1.3 Maksud dan Tujuan

Disusunnya Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Blitar dimaksudkan untuk merumuskan rencana kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Blitar untuk periode 1 (satu) tahun sebagai implementasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Renstra Perangkat Daerah.

Tujuan disusunnya Rencana Kerja adalah sebagai berikut:

- Merupakan pedoman pelaksanaan pelayanan Perangkat Daerah
- Sebagai penjabaran Rencana Kerja pemerintah daerah kota Blitar Tahun 2022;
- Sebagai pedoman pelaksanaan dan evaluasi program dan kegiatan;
- Sebagai pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD).

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Blitar Tahun 2022 sebagai berikut :

- BAB I Pendahuluan, menguraikan tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.
- BAB II Evaluasi Pelaksanaan RENJA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Blitar Tahun lalu, berisikan evaluasi pelaksanaan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Blitar Tahun lalu dan capaian Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Blitar, Analisis Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Blitar, Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Blitar, review terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.
- BAB III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah, menguraikan mengenai Telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Blitar.
- BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Blitar, menguraikan tentang program dan kegiatan dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Blitar yang disertai dengan prakiraan maju tahun 2023
- BAB V Penutup, menguraikan catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah – kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut penyusunan rencana kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Blitar tahun 2022

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun Lalu dan Capaian Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Guna memastikan kesinambungan serta kesesuaian program dan kegiatan yang telah ditetapkan dengan realisasinya, perlu dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan renja tahun lalu dan pencapaian renstra. Tujuan evaluasi pelaksanaan renja tahun lalu dan pencapaian renstra adalah untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan perangkat daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan renstra perangkat daerah serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Pada bab ini disajikan review terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Blitar tahun lalu (2020) dan prakiraan capaian tahun berjalan (2021) dengan mengacu pada APBD tahun 2021. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun – tahun sebelumnya. Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah.

Adapun program Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar yang dilaksanakan pada tahun 2020 (n-2) dan tahun 2021 (n - 1) adalah sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Perkantoran
2. Program Peningkatan Kapasitas Perangkat Daerah
3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
4. Program Pencegahan, Kesiapsiagaan dan Penanggulangan Korban Bencana
5. Program Penanganan Konflik dan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)

6. Program Pengembangan Nilai-nilai Kebangsaan, Persatuan dan Kesatuan Bangsa

7. Program Pengembangan Budaya Politik dan Penguatan Demokrasi

Sedangkan program yang dilaksanakan pada tahun 2021 (n - 1) adalah sebagai berikut :

1. Program Penanggulangan Bencana;
2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota;
3. Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan.
4. Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik
5. Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
6. Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya
7. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial

Rekapitulasi hasil evaluasi hasil pelaksanaan renja dan pencapaian renstra dijabarkan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel. 2.1.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar dan Pencapaian Renstra sampai dengan Tahun 2021 (Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d tahun 2020)

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target Program dan Kegiatan 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Resntra PD s/d Tahun 2021	
								Target Renja PD Tahun 2020	Realisasi Renja PD Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
				Urusan Pemerintahan									
				Bidang Urusan...									
01	06	01		Program Pelayanan Perkantoran	Persentase kecukupan pelayanan perkantoran	100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%
01	06	01	01	Pengelolaan Administrasi Perkantoran	Jumlah jenis ATK yang tersedia	32 macam	32 jenis	37 jenis	37 jenis	100%		32 macam	100%
					Jumlah barang cetakan yang tersedia	17 cetakan	17 cetakan	17 cetakan	17 cetakan	100%		17 cetakan	100%
					Jumlah lembar penggandaan	0	40.450 lbr	40.450 lbr	40.450 lbr	100%		0	
					Jumlah bahan bacaan yang tersedia	3 bahan bacaan	3 macam	3 macam	3 macam	100%		3 bahan bacaan	100%
					Jumlah dos/kotak makanan dan minuman yang tersedia	876 dos/kotak	664 dos	653 dos	653 dos	100%		876 dos/kotak	100%
					Jumlah porsi makanan minuman yang tersedia	0	350 porsi	0	0	100%		0	
					Jumlah cinderamata khas daerah yang tersedia	0	2 macam	0	0	100%		0	
					Jumlah benda pos tang tersedia	0	0	1 jenis	1 jenis	100%		0	
01	06	01	02	Rapat rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	Jumlah rapat rapat koordinasi dan konsultasi regional dan nasional yang tersedia	28 rakor	56 rakor	48 rakor	48 rakor	100%		28 rakor	100%
01	06	01	03	Penyediaan jasa perkantoran	Jumlah iuran kebersihan yang terbavarkan	0	12 kali	12 kali	12 kali	100%		0	

RENCANA KERJA TAHUN 2022

01	06	01	04	Penyusunan perencanaan pengelolaan dan pelaporan sarana prasarana perkantoran	Jumlah rekening yang terbayarkan	3 rek	3 rek	3 rek	3 rek	100%		3 rek	100%
					Jumlah kendaraan operasional yang terbayarkan pajaknya	0	15 unit	12 unit	12 unit	100%		0	
					Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	6 komponen	7 komponen	7 komponen	7 komponen	100%		6 komponen	100%
					Jumlah jenis peralatan Rumah Tangga kantor yang tersedia	15 macam	33 jenis	23 jenis	23 jenis	100%		15 macam	100%
					Jumlah perlengkapan gedung kantor yang tersedia	6 macam	2 macam	2 macam	2 macam	100%		6 macam	100%
					jumlah peralatan gedung kantor yang terpenuhi	5 macam	8 macam	3 macam	3 macam	100%		5 macam	100%
					Jumlah perlengkapan gedung kantor yang terpelihara	4 macam	5 macam	7 macam	7 macam	100%		4 macam	100%
					Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara	5 macam	5 macam	3 macam	3 macam	100%		5 macam	100%
					Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara	4 unit	4 unit	4 unit	4 unit	100%		4 unit	100%
					Jumlah kendaraan dinas/operasional yang tersedia	0	0	2 unit	2 unit	100%		0	
					Jumlah bangunan kantor yang terbangun	0	3 unit	0	0	0%		0	
					Jumlah bangunan kantor yang terpelihara	1 unit	1 unit	2.500 m2	2.500 m2	100%		1 unit	100%
					Jumlah mebelair yang terpelihara	3 macam	30 unit	1 jenis	1 jenis	0%		3 macam	100%
					Jumlah bangunan kantor yang terehab	0	3 unit	0	0	0%		0	
					Pemindahan mekanik elektronik dan sarpras kantor	0	5 unit	0	0	0%		0	
					Jumlah mebelair yang tersedia	7 macam	0	0	0	0%		7 macam	100%
					Jumlah taman kantor yang terawat	3 buah	0	0	0	0%		3 buah	100%
01	06	01	05	Penyusunan dan pelaporan ketatalaksanaan perangkat daerah	Jumlah jenis dokumen ketatalaksanaan yang tersusun	6 dokumen	6 jenis	6 dok	6 dok	100%		6 dokumen	100%
01	06	01	06	Penyusunan laporan keuangan	Jumlah jenis dokumen laporan keuangan yang tersusun	0	5 jenis	5 dok	5 dok	100%		0	
01	06	02		Program Peningkatan Kapasitas Perangkat Daerah	Tingkat partisipasi perangkat daerah dalam agenda kota	100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%

RENCANA KERJA TAHUN 2022

01	06	02	01	Pengelolaan administrasi dan kelengkapan kepegawaian	Jumlah event daerah dan hari besar nasional yang diikuti	6 event	4 even	3 even	3 even	100%		6 event	100%
01	06	02	02	Pengelolaan publikasi dan informasi perangkat daerah	Jumlah publikasi program/kegiatan perangkat daerah	2 publikasi	7 publikasi	4 publikasi	4 publikasi	100%		2 publikasi	100%
01	06	03		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase dokumen perencanaan dan pelaporan OPD tersusun tepat waktu dan sesuai aturan	100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%
01	06	03	01	Penyusunan dan Pelaporan perencanaan pembangunan perangkat daerah	Jumlah jenis dokumen perencanaan dan pelaporan yang tersusun	7 dokumen	8 jenis	11 dok	11 dok	100%		7 dokumen	100%
01	06	18		Program Pencegahan, Kesiap Siagaan dan Penanggulangan Korban Bencana	Prosentase tertanganinya kejadian bencana	100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%
01	06	18	01	Peningkatan kesiap siagaan dan kedaruratan bencana	Jumlah Koordinasi PUSDALOP PBP dan kelurahan tangguh bencana dan sekolah aman bencana	9 lap/6 kel/2 sklh	9 lap/9 kel/ 3 sek	21 kel/150 org	21 kel/150 org	100%		9 lap/6 kel/2 sklh	100%
					Jumlah peserta pembekalan pencegahan dini penanggulangan bencana alam	0	200 org	300 org	300 org	100%		0	
					Jumlah peserta koordinasi PUSDALOPS PB dan penanganan kejadian								
					Jumlah peserta pelatihan SAR tanggap darurat bencana dan memiliki kompetensi mitigasi bencana	0	0	200 org	200 org	100%		0	
01	06	18	02	Penyediaan sarana dan prasarana , logistik dan fasilitas rehab rekon kebencanaan	Jumlah jenis pengadaan sarana prasarana kebencanaan	12 jenis	15 jenis	19 jenis	19 jenis	100%		12 jenis	100%
					Jumlah fasilitas rehab rekon kebencanaan	0	1 kali	8 keg	8 keg	100%		0	
					Jumlah peserta rapat koordinasi pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana	0	0	50 org	50 org	100%		0	

RENCANA KERJA TAHUN 2022

01	06	19		Program Penanganan Konflik dan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)	1. Persentasi Potensi Konflik yang terdeteksi dan tertangani 2. Persentase penanganan penyakit masyarakat	100% 100%	100% 100%	100% 100%	100% 100%	100% 100%	100% 100%	100% 100%
01	06	19	01	Penguatan kewaspadaan daerah	Jumlah peserta rakor tim kewaspadaan dini pemerintah daerah	0	300 org	50 org	50 org	100%	0	
					Jumlah peserta sosialisasi penguatan kewaspadaan dini dan deteksi dini serta pengawasan orang asing	450 org	350 org	0	0	0%	450 org	100%
					Jumlah peserta Focus Group Discussion (FGD) pengaruh radikalisme	0	100 org	0	0	0%	0	
					Jumlah peserta bintek FKDM	0	35 org	0	0	0%	0	
					Jumlah peserta rapat koordinasi FKDM Kota	35 org	200 org	50 org	50 org	100%	35 org	100%
					Jumlah peserta peningkatan kapasitas analisis pemantauan kebijakan dan kondisi wilayah	0	0	60 org	60 org	100%	0	
					Jumlah laporan kewaspadaan dan deteksi dini serta pengawasan orang asing di Kota Blitar							
01	06	19	02	Pencegahan dan penanganan konflik	Jumlah fasilitasi pengamanan kegiatan daerah, keagamaan, tamu VVIP	3 posko	3 posko	3 posko	3 posko	100%	3 posko	100%
					Jumlah peserta sosialisasi pencegahan dan penyalahgunaan narkoba dan miras	150 org	322 org	200 org	200 org	100%	150 org	100%
					Fasilitasi Tim SATLAK P4GN	150 org	50 org	2 giat	2 giat	100%	150 org	100%
					Fasilitasi forum komunikasi pimpinan daerah (FORKOPINDA)	450 org	750 org	450 org	450 org	100%	450 org	100%
					Fasilitasi tim terpadu penanggulangan konflik sosial	0	75 org	60 org	60 org	100%	0	
					Fasilitasi pencegahan penanganan konflik	0	2.440 dos	4125 org	4125 org	100%	0	
01	06	20		Program Pengembangan Nilai Nilai Kebangsaan , Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Persentase penduduk usia 14 – 49 Tahun yang mengikuti wawasan kebangsaan	100%	80%	90%	90%	90%	100%	100%

RENCANA KERJA TAHUN 2022

01	06	20	01	Peningkatan Persatuan Kesatuan Bangsa dan Hak Asasi Manusia	Jumlah peserta desiminasi dan dialog kerukunan umat beragama dan pembauran kebangsaan	150 org	350 org	200 org	200 org	100%		150 org	100%
					Jumlah fasilitasi forum kerukunan umat beragama	0	25 org	250 org	250 org	100%		0	
					Jumlah jenis dokumen indeks kerukunan umat beragama	0	1 dok	1 dok	1 dok	100%		0	
					Jumlah peserta Talkshow kerukunan umat beragama	0	0	100 org	100 org	100%		0	
					Jumlah peserta Doa bersama lintas agama	0	0	500 org	500 org	100%		0	
					Jumlah peserta Sarasehan toleransi kerukunan umat beragama	225 org	0	150 org	150 org	100%		225 org	100%
					Jumlah peserta Talkshow pembauran Kebangsaan	0	0	100 org	100 org	100%		0	
					Jumlah peserta Sarasehan pemenuhan HAM	0	0	100 org	100 org	100%		0	
					Jumlah fasilitasi FPK	0	0	350 org	350 org	100%		0	
01	06	20	02	Peningkatan pengembangan nilai nilai wawasan kebangsaan	Jumlah peserta pusat pendidikan wawasan kebangsaan	33 org	150 org	0	0	0%		33 org	100%
					Jumlah peserta seminar wawasan kebangsaan	150 org	150 org	0	0	0%		150 org	100%
					Jumlah peserta diklat bela negara	150 org	100 org	100 org	100 org	100%		150 org	100%
					Jumlah potensi daerah yang mengandung wawasan kebangsaan (korsik)	10 upacara	50 orang	50 org	50 org	100%		10 upacara	100%
					Jumlah peserta Sarasehan dan Unjuk Gelar Aplikatif Tingkat SMP	0	0	150 org	150 org	100%		0	
					Jumlah peserta Jagong Pancasila	0	0	150 org	150 org	100%		0	
					Jumlah fasilitasi Gerakan Nasional Revolusi Mental dan pokja PPWK	0	0	50 org	50 org	100%		0	
					Jumlah peserta korsik	0	0	50 org	50 org	100%		0	
					Fasilitasi upacara bela Negara	0	0	100 org	100 org	100%		0	
					Jumlah pawai kebangsaan	0	0	2380 org	2380 org	100%		0	
01	06	21		Program Pengembangan Budaya Politik dan Penguatan Demokrasi	Prosentase penduduk pemilih yang menggunakan hak pilihnya	82%	80%	81%	81%	81%		82%	82%
					persentase ormas/ormpol yang dibina sesuai aturan	80%	76%	78%	78%	78%		80%	80%
01	06	21	01	Peningkatan Kesadaran Politik	Jumlah peserta diskusi dan dialog politik	100 org	350 org					100 org	100%

RENCANA KERJA TAHUN 2022

				dan Kapasitas Politik	Fasilitasi Pengukuran IDI	10 buku	28 variabel	1 dok	1 dok	100%		10 buku	100%
					Jumlah peserta peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemilu	0	750 orang	2110 org	2110 org	100%		0	
					Jumlah peserta sarasehan budaya politik	0	0	200 org	200 org	100%		0	
					Jumlah peserta kegiatan pendidikan politik	0	0	450 org	450 org	100%		0	
					Jumlah peserta peningkatan kapasitas partai politik	130 org	0	60 org	60 org	100%		130 org	100%
					Jumlah peserta talkshow politik forum komunikasi pemuda	450 org	0					450 org	100%
01	06	21	02	Peningkatan Kapasitas dan Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah peserta penyuluhan organisasi masyarakat dan pemberdayaan organisasi masyarakat	200 org	365 org	0	0	0%		200 org	100%
					Jumlah peserta seminar/ lokakarya ormas	100 ormas	0	190 ormas	190 ormas	100%		100 ormas	100%
					Jumlah data base ormas	0	0	1 data base	1 data base	100%		0	
					Jumlah peserta jambore kepemudaan organisasi kemasyarakatan	0	0	160 org	160 org	100%		0	
01	06	21	03	Penyelenggaraan Pendukung Pemilu	Jumlah Petugas Pemantau Pemilu yang terfasilitasi	325 org	479 org	314 org	314 org	100%		325 org	100%
					Jumlah jenis sarana prasarana Pendukung Pemilu yang terfasilitasi	0	4 jenis	9 sarpras	9 sarpras	100%		0	

Tabel. 2.1.2

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar dan Pencapaian Renstra sampai dengan Tahun 2021 (Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan sampai dengan tahun 2021 – Sesuai Permendagri 90 Tahun 2019)

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kota Blitar pada Tahun 2021	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Blitar sampai dengan RKPD Kota Blitar Tahun 2020	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Blitar Tahun Lalu			Target Program dan Kegiatan (Renja Tahun 2021)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Blitar s/d Tahun 2021	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kota Blitar s/d Tahun 2021
				Target Renja Tahun 2020	Realisasi Renja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat									
PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase tertanganinya kejadian bencana	100%					100%	100%	100%
Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase warga yang memperoleh Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	100%					100%	100%	100%
Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	1. Jumlah kelurahan tangguh bencana	5 kelurahan					5 kelurahan	5 kelurahan	100%
	2. Jumlah peserta pembekalan pencegahan dini penanggulangan bencana alam	150 orang					150 orang	150 orang	100%
Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah peserta koordinasi PUSDALOPS PB dan penanganan kejadian	160 orang					160 orang	160 orang	100%
Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana									100%
Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah jenis pengadaan sarana prasarana kebencanaan	2 jenis					2 jenis	2 jenis	100%

RENCANA KERJA TAHUN 2022

Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana									100%
Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah peserta rehab rekon kebencanaan	100 orang					100 orang	100 orang	100%
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Baik					Baik	Baik	100%
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	100%					100%	100%	100%
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah jenis koordinasi dan sinkronisasi perencanaan perangkat daerah	6 dokumen					6 dokumen	6 dokumen	100%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah jenis dokumen evaluasi perangkat daerah	11 dokumen					11 dokumen	11 dokumen	100%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	100%					100%	100%	100%
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang dibayarkan	1 OPD					1 OPD	1 OPD	100%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran	Jumlah jenis laporan keuangan bulanan/semesteran yang disusun	5 dokumen					5 dokumen	5 dokumen	100%
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	100%					100%	100%	100%
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	1. Jumlah event daerah dan hari besar nasional yang diikuti	4 even					4 even	4 even	100%
	2. Jumlah Publikasi Program/kegiatan Perangkat Daerah	4 publikasi					4 publikasi	4 publikasi	100%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	100%					100%	100%	100%
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	6 komponen					6 komponen	6 komponen	100%

RENCANA KERJA TAHUN 2022

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah jenis peralatan rumah tangga kantor yang tersedia	28 jenis					28 jenis	28 jenis	100%
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah dos/kotak makanan dan minuman yang tersedia	1020 dos					1020 dos	1020 dos	100%
	Jumlah jenis alat tulis kantor yang tersedia	43 jenis					43 jenis	43 jenis	100%
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang tersedia	8 cetakan					8 cetakan	8 cetakan	100%
	Jumlah lembar penggandaan	28473 lembar					28473 lembar	28473 lembar	100%
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah bahan bacaan yang tersedia	3 bahan bacaan					3 bahan bacaan	3 bahan bacaan	100%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi regional dan nasional yang diikuti	45 rakor					45 rakor	45 rakor	100%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	100%					100%	100%	100%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening yang terbayarkan	3 rekening					3 rekening	3 rekening	100%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah iuran kebersihan yang terbayarkan	12 kali					12 kali	12 kali	100%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar	100%					100%	100%	100%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional terpelihara	4 unit					4 unit	4 unit	100%
	Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara dan dibayarkan perizinannya	14 unit					14 unit	14 unit	100%
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara	6 jenis					6 jenis	6 jenis	100%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah bangunan kantor yang terpelihara	180 m2					180 m2	180 m2	100%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang terpelihara	3 jenis					3 jenis	3 jenis	100%
PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Penduduk usia 14 s/d 49 tahun yang mengikuti wawasan kebangsaan	100%					100%	100%	100%

RENCANA KERJA TAHUN 2022

Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase peserta yang mengikuti pembinaan Ideologi Pancasila	95%					95%	95%	100%
	Persentase peserta yang mengikuti pembinaan Karakter Kebangsaan	95%					95%	95%	100%
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	1. Jumlah peserta desiminasi dan dialog Kerukunan Umat Bergama dan Pembauran Kebangsaan (FPK)	350 orang					350 orang	350 orang	100%
	2. Jumlah fasilitasi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)	38 orang					38 orang	38 orang	100%
	3. Jumlah peserta diklat bela negara	100 orang					100 orang	100 orang	100%
	4. Jumlah peserta pusat pendidikan wasbang (anggota korsik yang terfasilitasi, panitia pawai, undangan upacara Hari Bela Negara)	350 orang					350 orang	350 orang	100%
Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah dokumen indeks kerukunan umat beragama	1 dokumen					1 dokumen	1 dokumen	100%
PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase penduduk pemilih yang menggunakan hak pilihnya	82%					82%	82%	100%
Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Persentase parpol yang akuntabel	75%					75%	75%	100%

RENCANA KERJA TAHUN 2022

Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	1. Hibah Parpol	8 parpol					8 parpol	8 parpol	100%
	2. Jumlah peserta diskusi dialog politik	960 orang					960 orang	960 orang	100%
	3. Jumlah peserta peningkatan partisipasi masyarakat	1200 orang					1200 orang	1200 orang	100%
Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah fasilitasi pengukuran IDI	1 dokumen					1 dokumen	1 dokumen	100%
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase ormas/ orpol yang dibina sesuai aturan	80%					80%	80%	100%
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase ormas aktif	75%					75%	75%	100%
Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Peserta Penyuluhan Organisasi msyarakat dan pemberdayaan organisasi masyarakat	500 orang					500 orang	500 orang	100%
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase penanganan penyakit masyarakat	100%					100%	100%	100%
Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya	Persentase penanganan penyakit masyarakat yang terfasilitasi	100%					100%	100%	100%
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat	1. Jumlah Fasilitasi Tim SATLAK pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika (P4GN)	100 orang					100 orang	100 orang	100%

RENCANA KERJA TAHUN 2022

Kepercayaan di Daerah	2. Hibah BNK	1 lembaga					1 lembaga	1 lembaga	100%
	3. Jumlah peserta sosialisasi pencegahan penyalahgunaan miras dan narkoba	100 orang					100 orang	100 orang	100%
Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	1. Jumlah Fasilitas Tim Terpadu penanganan konflik sosial	200 orang					200 orang	200 orang	100%
	2. Hibah POLRI	1 lembaga					1 lembaga	1 lembaga	100%
	3. Hibah TNI	1 lembaga					1 lembaga	1 lembaga	100%
	4. Jumlah fasilitas pengamanan kegiatan daerah, keagamaan, tamu VVIP	3 posko					3 posko	3 posko	100%
	5. Jumlah petugas yang melaksanakan fasilitas pencegahan penanganan konflik	2300 orang					2300 orang	2300 orang	100%
PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase potensi konflik yang terdeteksi dan tertangani	100%					100%	100%	100%
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Persentase potensi konflik yang terdeteksi ditangani dan terfasilitasi	100%					100%	100%	100%
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	1. Jumlah fasilitas Forum Komunikasi Pimpinan Daerah	400 orang					400 orang	400 orang	100%
	2. Jumlah peserta rakor tim kewaspadaan dini Pemerintah Daerah	50 orang					50 orang	50 orang	100%
	3. Jumlah peserta rapat koordinasi FKDM Kota	140 orang					140 orang	140 orang	100%
Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	1. Jumlah laporan kewaspadaan dan deteksi dini serta pengawasan orang asing di Kota Blitar	3 laporan					3 laporan	3 laporan	100%

RENCANA KERJA TAHUN 2022

	2. Jumlah peserta sosialisasi penguatan kewaspadaan dan deteksi dini serta pengawasan orang asing	300 orang					300 orang	300 orang	
--	---	-----------	--	--	--	--	-----------	-----------	--

Program/kegiatan tahun 2020 semua telah memenuhi pencapaian realisasi target sebagaimana berikut :

NO	Program / Kegiatan	%
A	Program Pelayanan Perkantoran	92,62
1	Pengelolaan Administrai Perkantoran	84,69
2	Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	90,59
3	Penyediaan Jasa Perkantoran	100,00
4	Penyusunan Perencanaan, Pengelolaan dan Pelaporan Sarana Prasarana Perkantoran	95,46
5	Penyusunan dan Pelaporan Ketatalaksanaan Perangkat Daerah	100,00
6	Penyusunan Laporan Keuangan	100,00
B	Program Peningkatan Kapasitas Perangkat Daerah	96,44
1	Pengelolaan Administrasi dan Kelengkapan Kepegawaian	93,68
2	Pengelolaan Publikasi dan Informasi Perangkat Daerah	99,22
C	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100,00
1	Penyusunan dan Pelaporan Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	100,00
D	Program Pencegahan, Kesiapsiagaan dan Penanggulangan Korban Bencana	75,81
1	Peningkatan Kesiapsiagaan dan Kedaruratan Bencana	76,48
2	Penyediaan Sarana dan Prasarana, Logistik, dan Fasilitas Rehab, Rekon Kebencanaan	75,27
E	Program Penanganan Konflik dan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)	85,31
1	Penguatan Kewaspadaan Daerah	87,38
2	Pencegahan dan Penanganan Konflik	84,76
F	Program Pengembangan Nilai-nilai Kebangsaan, Persatuan dan Kesatuan Bangsa	88,06
1	Peningkatan Persatuan Kesatuan Bangsa dan Hak Asasi Manusia	91,42
2	Peningkatan Pengembangan Nilai-nilai Wawasan Kebangsaan	80,80
G	Program Pengembangan Budaya Politik dan Penguatan Demokrasi	88,80
1	Peningkatan Kesadaran Politik dan Kapasitas Politik	90,96
2	Peningkatan Kapasitas dan Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan	95,69
3	Penyelenggaraan Pendukung Pemilu	87,86

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Ada beberapa faktor yang merupakan pendorong keberhasilan dan beberapa faktor penghambat / kendala dalam pelaksanaan atau perwujudan dari misi organisasi. Faktor – faktor dimaksud antara lain sebagai berikut :

1. Faktor Pendorong :

- a. Struktur Organisasi Badan Kesbang, Politik dan Penanggulangan Bencana Daerah yang telah sesuai dengan Peraturan Walikota Blitar Nomor 39 Tahun 2014 sehingga menjadi lebih ramping dan kaya fungsi dengan diisi oleh staf yang mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.
- b. Mekanisme kerja Badan Kesbang dan Politik yang berorientasi kepada pencapaian kinerja dari pada pembangunan sektoral.
- c. Adanya hubungan kerja yang baik dan komitmen yang kuat antara pimpinan dan staf Badan Kesbang dan Politik, dalam menciptakan suasana kerja yang kondusif sehingga menimbulkan motivasi kerja yang tinggi.
- d. Adanya dukungan OPD terhadap upaya peningkatan kualitas perencanaan pembangunan.
- e. Pola kerja yang sistemik dan terjadwal sehingga mampu memberikan hasil yang optimal, efektif dan efisien.

2. Faktor Penghambat :

- a. Belum memadainya jumlah tenaga yang menguasai bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.
- b. Belum tersedianya data – data pembangunan yang tersusun secara sistematis dan akurat sehingga menimbulkan kendala dalam proses penciptaan daerah yang kondusif komprehensif dan berkelanjutan.
- c. Belum memadainya kemampuan untuk menyusun suatu kerangka pembangunan strategis yang benar – benar mencerminkan kondisi, potensi dan kebutuhan masyarakat.
- d. Belum optimalnya kegiatan penelitian dan pengkajian sebagai dasar pengambilan keputusan dalam proses penciptaan yang kondusif.
- e. Masih terdapatnya kebijakan pembangunan pusat yang sering kali berubah karena perkembangan politik.

Dari analisis diatas, dapat dilihat bahwa secara keseluruhan keterkaitan dalam pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja OPD) tahun 2020 dapat dikatakan sangat berhasil walaupun masih banyak dijumpai hambatan dalam pelaksanaannya. Akan tetapi dalam pelaksanaannya dimasa mendatang perlu ditingkatkan lagi sehingga dapat diperoleh hasil yang lebih baik. Hal tersebut dapat dijelaskan secara lebih rinci dalam tabel 2.2 sebagai berikut :

TABEL 2.2
PENCAPAIAN KINERJA BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PBD
KOTA BLITAR

No.	Indikator	SPM/Standart Nasional	IKK	Target Renstra PD					Realisasi Capaian				Proyeksi	Catatan Analisis
				Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12	14	15
1	Prosentase kejadian SARA yang tertangani			100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
2	Persentase konflik sosial yang tertangani			100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
3	Persentase kelurahan tangguh bencana			25%	35 %	45 %	60%	80%	23,8 %	38 %	47,6 %	80,9 %	80%	
4	Persentase ormas dan orpol yang terdaftar			72%	74 %	76 %	78%	80%	72,19%	73,19 %	73,98 %	74,6 %	80%	

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Kesbang dan Politik.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Badan Kesbang dan Politik Kota Blitar tidak dapat terlepas dari isu – isu strategis yang melingkupinya. Isu – isu strategis dimaksud antara lain :

1. Sumberdaya manusia yang terbatas, yang belum sepenuhnya diarahkan pada pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sehingga belum optimal;
2. Pengelolaan anggaran yang belum sepenuhnya mengarah kepada peningkatan kinerja;
3. Belum tersedianya data – data pembangunan yang tersusun secara sistematis dan akurat sehingga menimbulkan kendala dalam perencanaan pembangunan yang komprehensif dan berkelanjutan;
4. Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi program – program pembangunan yang dikaitkan dengan dokumen – dokumen perencanaan;
5. Pengaruh Globalisasi yang membuat semakin pesatnya perkembangan teknologi dan masuknya kultur asing yang bebas;
6. Perubahan peraturan perundang – undangan sehingga belum sepenuhnya dapat terintegrasi secara baik sehingga dapat menghambat pencapaian tujuan pembangunan nasional dan daerah;
7. Belum meratanya kualitas SDM Perencana;
8. Masih belum optimalnya kapasitas kelembagaan untuk mendukung peningkatan kinerja Badan Kesbang dan Politik.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal Rencana Kinerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan pemerintah untuk periode satu tahun dan merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, dan rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju yang selanjutnya akan dipakai sebagai dasar penyusunan KUAPPAS.

Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berdasarkan RKPD Kota Blitar sifatnya sebagai pendukung dari pelaksanaan Renja PD se- Kota Blitar yang melaksanakan program dan kegiatan berlokasi di Wilayah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

TABEL 2.4
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2022
KOTA BLITAR

Nama PD : BADAN KESBANG DAN POLITIK

No	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	RANCANGAN AWAL RKPD				HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
		LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF Rp.	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	BAKES BANGP OL	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	88,65	4.297.931.428						
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	100 %	37.020.400						
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah jenis dokumen perencanaan yang tersusun (RENSTRA, PK, RENAKSI, SPP, SOP, RENJA, RKA, DPA, PRKA, DPPA)	8 dokumen	8.510.200						
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah jenis dokumen pelaporan yang tersusun (LKjIP, LKPJ, LPPD, SKM, SPM, Evaluasi RKPD, Pengukuran kinerja tribulan, monev tribulan)	8 dokumen	18.510.200						
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	100 %	8.564.800						
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah ASN yang diberikan Gaji dan Tunjangan	24 ASN	3.475.425.228						
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/S emesteran SKPD		Jumlah jenis dokumen laporan keuangan yang tersusun (Bulanan/Semesteran)	5 dokumen	8.564.800						

RENCANA KERJA TAHUN 2022

	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	100 %	73.392.200						
	Sosialisasi Peraturan Perundang - Undangan		Jumlah event daerah dan hari besar nasional yang diikuti	4 event	73.392.200						
			Jumlah Publikasi Program/kegiatan Perangkat Daerah	3 jenis							
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	100 %	443.272.200						
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	6 komponen	8.814.000						
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah peralatan gedung kantor yang terpenuhi	0	173.897.300						
			Jumlah perlengkapan gedung kantor yang terpenuhi (TERMASUK MEBELAIR)	1 jenis							
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah jenis peralatan rumah tangga kantor yang tersedia	28 jenis	16.234.700						
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah dos/kotak makanan dan minuman yang tersedia	1020 dos	47.983.600						
			Jumlah jenis alat tulis kantor yang tersedia	43 jenis							
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah barang cetakan yang tersedia	8 cetakan	38.807.600						
			Jumlah lembar penggandaan	28473 lembar							
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah bahan bacaan yang tersedia	3 bahan bacaan	7.440.000						
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi regional dan nasional yang diikuti	45 rakor	150.095.000						
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	100%	44.895.900						

RENCANA KERJA TAHUN 2022

	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah rekening yang terbayarkan (termasuk Listrik, air, telepon, internet)	3 rekening	43.393.500						
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		jumlah iuran kebersihan yang terbayarkan	12 kali	1.502.400						
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar	100%	215.360.700						
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah kendaraan dinas yang terbayarkan pajaknya	14 unit	87.879.900						
			Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional terpelihara	5 unit							
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara (termasuk komputer, laptop, PC, printer, TV, Scanner, Kamera, Fax)	6 jenis	24.035.300						
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah bangunan kantor yang terpelihara (termasuk pengecatan)	1 unit	81.880.000						
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah jenis perlengkapan gedung kantor yang terpelihara (termasuk AC, Exhaust fan, kipas angin yang menempel di dinding, mebelair)	3 jenis	21.565.500						
2	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN		Persentase penurunan konflik keagamaan	100%	623.972.900						
			Persentase kampung berkarakter Pancasila	9,5%							
	Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan		Persentase pemahaman masyarakat yang mengikuti pembinaan ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	81%	623.972.900						
			Jumlah kampung berkarakter Pancasila	2							
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang		1. Jumlah peserta pembinaan ideologi Pancasila	200 orang	348.972.900						

RENCANA KERJA TAHUN 2022

	Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan		2. Jumlah Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) yang terfasilitasi	17 orang							
			3. Jumlah Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) yang terfasilitasi	21 orang							
			4. Jumlah peserta diklat bela negara	100 orang							
			5. Jumlah anggota korsik yang terfasilitasi	50 orang							
			6. Jumlah fasilitasi upacara Hari Bela Negara	100 orang							
			7. Jumlah fasilitasi pawai kebangsaan	0							
			8. Jumlah pembentukan Kampung berkarakter Pancasila	2 kampung							
	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan		Jumlah dokumen indeks kerukunan umat beragama	1 dokumen	275.000.000						
			Jumlah Lembaga yang mendapatkan hibah	2 lembaga							
3	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK		Persentase partai politik yang aktif dalam pendidikan politik masyarakat	100%	747.232.075						
	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi		Persentase pemahaman masyarakat yang mengikuti pendidikan politik	81%	747.232.075						

	Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik										
	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah		1. Jumlah peserta sosialisasi peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemilu	200 orang	38.035.800						
			2. Jumlah tim desk pemilu yang terfasilitasi	0							
			3. Jumlah petugas pemantau pemilu yang terfasilitasi	0							
			4. Jumlah jenis sarana dan prasarana pendukung pemilu yang terfasilitasi	0							
			5. Jumlah lembaga penyelenggara pemilu yang mendapatkan hibah	0							
	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		1. Jumlah peserta pendidikan politik	120 orang	49.290.700						
			2. Jumlah peserta peningkatan partisipasi perempuan dalam bidang politik	150 orang							
			3. Jumlah peserta peningkatan kapasitas kelembagaan politik	15 parpol							
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi		1. Jumlah fasilitasi pengukuran IDI	1 dokumen	659.905.575						
			2. Jumlah peserta peningkatan kualitas demokrasi	40 orang							

RENCANA KERJA TAHUN 2022

	Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		3. Jumlah penerima hibah parpol	8 parpol							
4	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN		Persentase organisasi kemasyarakatan yang aktif	65%	132.617.500						
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan		Persentase ormas aktif yang mengikuti pemberdayaan	72%	132.617.500						
	Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah		1. Jumlah Peserta pembinaan dan pengawasan ormas	120 orang	132.617.500						
			2. Jumlah peserta Pengelolaan sistem informasi ormas	120 orang							
			3. Jumlah peserta pemberdayaan ormas	30 ormas							
5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA		Persentase masyarakat yang mendapatkan peningkatan kompetensi pembinaan sosial	76%	1.526.899.600	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA		Persentase masyarakat yang mendapatkan peningkatan kompetensi pembinaan sosial	76%		
	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya		Persentase masyarakat yang mengikuti sosialisasi	85%	276.899.600	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan		Persentase masyarakat yang mengikuti sosialisasi	85%		

RENCANA KERJA TAHUN 2022

						Budaya					
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah		1. Jumlah Fasilitasi Tim SATLAK pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika (P4GN)	3 kali	276.899.600						
			2. Jumlah peserta sosialisasi pencegahan penyalahgunaan miras dan narkoba	75 orang							
			3. Jumlah Fasilitasi Tim Terpadu penanganan konflik sosial	4 kali							
			4. Jumlah fasilitasi pengamanan kegiatan daerah, keagamaan, tamu VVIP	3 posko				4. Jumlah fasilitasi pengamanan kegiatan daerah, keagamaan, tamu VVIP	3 posko	158.420.600	Posko pengamanan Natal dan tahun Baru
			5. Jumlah petugas yang melaksanakan fasilitasi pencegahan penanganan konflik	1288 orang							
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah		Jumlah Lembaga yang mendapatkan hibah	3 lembaga	1.250.000.000						
6	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL		Persentase potensi Konflik Sosial yang terselesaikan	100%	164.530.500						

RENCANA KERJA TAHUN 2022

	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial		Persentase laporan potensi konflik sosial yang ditindaklanjuti	100%	164.530.500						
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		1. Jumlah peserta rakor tim kewaspadaan dini Pemerintah Daerah	90 orang	158.630.500						
			2. Jumlah fasilitasi FKDM Kota	4 kali							
			3. Jumlah fasilitasi tim terpadu anti radikalisme	0							
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		1. Jumlah laporan kewaspadaan dan deteksi dini serta pengawasan orang asing di Kota Blitar	1 laporan	5.900.000						
			2. Jumlah Lembaga pengaman pemilu yang mendapatkan hibah	0							

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Tabel 2.5
USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PEMANGKU
KEPENTINGAN TAHUN 2022
KOTA BLITAR

No	Program / kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
1	Sosialisai narkoba dan potensi konflik sosial	Kelurahan Ngadirejo	Jumlah peserta Sosialisai narkoba dan potensi konflik social	30 orang	Diakomodir
2	Sosialisai narkoba dan potensi konflik sosial	Kelurahan Turi	Jumlah peserta Sosialisai narkoba dan potensi konflik social	30 orang	Diakomodir
3	Diklat wawasan kebangsaan	Kelurahan Tanggung	Jumlah peserta Diklat wawasan kebangsaan	20 orang	Diakomodir
4	Sosialisai narkoba dan potensi konflik sosial	Kelurahan Sukorejo	Jumlah peserta Sosialisai narkoba dan potensi konflik social	40 orang	Diakomodir
5	Diklat wawasan kebangsaan	Kelurahan Sukorejo	Jumlah peserta Diklat wawasan kebangsaan	50 orang	Diakomodir
6	Diklat wawasan kebangsaan	Kelurahan Sukorejo	Jumlah peserta Diklat wawasan kebangsaan	50 orang	Diakomodir
7	Diklat wawasan kebangsaan	Kelurahan Sukorejo	Jumlah peserta Diklat wawasan kebangsaan	40 orang	Diakomodir
8	Sosialisai narkoba dan potensi konflik sosial	Kelurahan Karangsari	Jumlah peserta Sosialisai narkoba dan potensi konflik social	50 orang	Diakomodir
9	Diklat wawasan kebangsaan	Kelurahan Sentul	Jumlah peserta Diklat wawasan kebangsaan	15 orang	Diakomodir
10	(UNTUK HIBAH) Kurangnya pembiayaan operasional lembaga, dan kegiatan yang berkaitan dengan pengamanan	POLRESTA BLITAR	Jumlah Lembaga yang mendapatkan hibah	1 lembaga	Diakomodir
11	Diklat wawasan kebangsaan	Kelurahan Gedog	Jumlah peserta Diklat wawasan kebangsaan	30 orang	Diakomodir
12	Diklat wawasan kebangsaan	Kelurahan Gedog	Jumlah peserta Diklat wawasan kebangsaan	30 orang	Diakomodir
13	(UNTUK HIBAH) Kurangnya dukungan terhadap lembaga yang membantu pemerintah daerah mewujudkan kerukunan antar umat beragama	FKUB	Jumlah Lembaga yang mendapatkan hibah	1 lembaga	Diakomodir
14	(UNTUK HIBAH) Belum optimalnya pencegahan dan penanggulangan narkoba di Kota Blitar	BNK	Jumlah Lembaga yang mendapatkan hibah	1 lembaga	Diakomodir
15	(UNTUK HIBAH) Belum optimalnya dukungan pemangku kepentingan terhadap pendidikan politik masyarakat	PPP	Jumlah penerima hibah parpol	1 parpol	Diakomodir
16	(UNTUK HIBAH) Belum optimalnya dukungan pemangku kepentingan terhadap pendidikan politik masyarakat	PKS	Jumlah penerima hibah parpol	1 parpol	Diakomodir
17	(UNTUK HIBAH) Belum optimalnya dukungan pemangku kepentingan terhadap pendidikan politik masyarakat	GOLKAR	Jumlah penerima hibah parpol	1 parpol	Diakomodir

18	(UNTUK HIBAH) Belum optimalnya dukungan pemangku kepentingan terhadap pendidikan politik masyarakat	PDIP	Jumlah penerima hibah parpol	1 parpol	Diakomodir
19	(UNTUK HIBAH) Belum optimalnya dukungan pemangku kepentingan terhadap pendidikan politik masyarakat	HANURA	Jumlah penerima hibah parpol	1 parpol	Diakomodir
20	(UNTUK HIBAH) Belum optimalnya dukungan pemangku kepentingan terhadap pendidikan politik masyarakat	PKB	Jumlah penerima hibah parpol	1 parpol	Diakomodir
21	(UNTUK HIBAH) Belum optimalnya dukungan pemangku kepentingan terhadap pendidikan politik masyarakat	GERINDRA	Jumlah penerima hibah parpol	1 parpol	Diakomodir
22	(UNTUK HIBAH) Kurangnya pembiayaan operasional lembaga, dan kegiatan yang berkaitan dengan pengamanan	KODIM 0808	Jumlah penerima hibah parpol	1 parpol	Diakomodir
23	(UNTUK HIBAH) Belum optimalnya dukungan pemangku kepentingan terhadap pendidikan politik masyarakat	DEMOKRAT	Jumlah penerima hibah parpol	1 parpol	Diakomodir
24	Sosialisai narkoba	Kelurahan Klampok	Jumlah peserta Sosialisai narkoba	30 orang	Diakomodir
25	(UNTUK HIBAH) Kurangnya dukungan terhadap lembaga yang membantu pemerintah daerah mewujudkan pembauran kebangsaan	FPK	Jumlah Lembaga yang mendapatkan hibah	1 lembaga	Diakomodir

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Kebijakan Nasional sebagaimana tertuang dalam rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2022, disebutkan prioritas pembangunan nasional sebagai berikut:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan, dengan sasaran :
 - Meningkatnya daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan;
 - Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor, dan daya saing perekonomian;
 - Pemenuhan Kebutuhan Energi dengan Mengutamakan Peningkatan Energi Baru Terbarukan (EBT);
 - Peningkatan kuantitas/ketahanan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi;
 - Peningkatan ketersediaan, akses, dan kualitas konsumsi pangan;
 - Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan, dan kelautan;
 - Penguatan kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM) dan koperasi
 - Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi;
 - Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) ; dan
 - Penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi

2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan, dan Menjamin Pemerataan dengan sasaran :
 - Pembangunan Wilayah Sumatera;
 - Pembangunan Wilayah Jawa-Bali;
 - Pembangunan Wilayah Nusa Tenggara;
 - Pembangunan Wilayah Kalimantan;
 - Pembangunan Wilayah Sulawesi;
 - Pembangunan Wilayah Maluku; dan
 - Pembangunan Wilayah Papua.
3. Meningkatkan SDM berkualitas dan Berdaya saing, dengan sasaran :
 - Terkendalinya pertumbuhan penduduk dan menguatnya tata kelola kependudukan;
 - Meningkatnya perlindungan sosial bagi seluruh penduduk;
 - Terpenuhinya layanan dasar bidang kesehatan dan pendidikan;
 - Meningkatnya kualitas anak, perempuan, dan pemuda;
 - Meningkatnya aset produktif bagi rumah tangga miskin dan rentan;
 - Meningkatnya produktivitas dan daya saing.
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan, dengan sasaran:
 - Menguatnya revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila untuk memantapkan ketahanan budaya;
 - Meningkatnya pemajuan kebudayaan untuk meningkatkan peran kebudayaan dalam pembangunan;
 - Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat dan daya rekat sosial;

- Menguatnya moderasi beragama untuk mewujudkan kerukunan umat dan membangun harmoni sosial dalam kehidupan masyarakat;
 - Meningkatnya ketahanan keluarga untuk memperkuat karakter bangsa; dan
 - Meningkatnya budaya literasi untuk mewujudkan masyarakat berpengetahuan, inovatif, dan kreatif
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar, dengan sasaran :
- Meningkatnya penyediaan infrastruktur layanan dasar;
 - Meningkatnya konektivitas untuk mendukung kegiatan ekonomi dan akses menuju pelayanan dasar;
 - Meningkatnya layanan infrastruktur perkotaan;
 - Meningkatnya layanan energi dan ketenagalistrikan; dan
 - Meningkatnya layanan infrastruktur TIK.
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim, dengan sasaran :
- Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup;
 - Berkurangnya Kerugian Akibat Dampak Bencana dan Bahaya Iklim; dan
 - Meningkatnya capaian penurunan emisi dan intensitas emisi Gas Rumah Kaca (GRK) terhadap baseline.
7. Memperkuat Stabilitas polhukam dan transformasi pelayanan publik dengan sasaran :
- Terwujudnya Demokrasi yang Terkonsolidasi, Terpeliharanya Kebebasan, Menguatnya Kapasitas Lembaga-Lembaga Demokrasi, dan Terjaganya Kesenjangan Warga Negara secara Optimal;
 - Optimalnya Kebijakan Luar Negeri;
 - Meningkatnya Penegakan Hukum Nasional yang Mantap;

- Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik; dan
- Terjaganya Stabilitas Keamanan Nasional.

Berdasarkan arah kebijakan Nasional Tahun 2022, maka dalam kaitan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Blitar yaitu melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pembinaan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam negeri sedangkan dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik di wilayah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. pelaksanaan koordinasi di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan,

penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- e. pelaksanaan fasilitasi forum koordinasi pimpinan daerah kota;
- f. pelaksanaan administrasi kesekretariatan badan kesatuan bangsa dan politik kota;
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota.

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategik, yang akan dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Blitar melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi SKPD untuk mencapai dan melaksanakannya dalam tahun tertentu. Sehingga ditentukan indikator Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Blitar berdasarkan kelompok sasaran sebagai berikut :

Tujuan : Meningkatnya Kerukunan Antar Umat Beragama

Tabel 3.2.1
Indikator Tujuan dan Formula perhitungan (Renstra 2016 - 2021)

INDIKATOR	FORMULA PERHITUNGAN	Target	Realisasi	Target	
		2020		2021	2022
Indeks Kerukunan Umat Beragama	Rumus Indeks	80	84,40	80	-

Tabel 3.2.2
Indikator Tujuan dan Formula Perhitungan (Renstra 2021 - 2026)

INDIKATOR	FORMULA PERHITUNGAN	Target	Realisasi	Target	
		2020		2021	2022
Indeks Kerukunan Umat Beragama	Rumus Indeks	80	84,40	80	83,6

Tabel 3.2.3
Sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Blitar Tahun 2022
(Renstra 2016 - 2021)

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Target	
			2020		2021	2022
1	Meningkatnya Komunikasi dan Silaturahmi Antar Umat Beragama	Prosentase kejadian SARA yang tertangani	100 %	100 %	100%	
2	Meningkatnya partisipasi masyarakat untuk menciptakan kondisi yang aman dan tentram	Persentase konflik sosial yang tertangani	100 %	100 %	100%	
3	Meningkatnya ketangguhan masyarakat dalam menghadapi bencana	Persentase kelurahan tangguh bencana	60%	80,9 %	80%	
4	Meningkatnya pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dan partai politik	Persentase ormas dan orpol yang terdaftar	78 %	74,6 %	80%	

Tabel. 3.2.4
Sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Blitar Tahun 2022
(Renstra 2021 – 2026)

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Target	
			2020		2021	2022
1	Meningkatnya Komunikasi dan Silaturahmi Antar Umat Beragama	Persentase Kejadian SARA Tertangani	100%	100%	100%	100%
		Persentase konflik sosial tertangani	100%	100%	100%	100%
		Persentase Ormas dan Orpol yang aktif				80,1%

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Rencana kerja dan pendanaan tahun 2022 berisi program dan kegiatan serta pagu indikatif, yang dirancang untuk mendukung terwujudnya capaian Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Blitar untuk mendukung prioritas pembangunan daerah, dan prioritas perangkat daerah maupun untuk pemenuhan pelayanan Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintah daerah.

Tabel 4.1
Sasaran dan Program/Kegiatan Tahun 2022
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Sasaran	Indikator	Program/Kegiatan	Anggaran	Lokasi
Meningkatnya Komunikasi dan Silaturahmi Antar Umat Beragama	Persentase Kejadian SARA Tertangani	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	623.972.900	Bakesbangpol dan PBD
		Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan		Bakesbangpol dan PBD
	Persentase konflik sosial tertangani	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	1.526.899.600	Bakesbangpol dan PBD
		Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya		Bakesbangpol dan PBD
		Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	164.530.500	Bakesbangpol dan PBD
		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial		
	Persentase Ormas dan Orpol yang aktif	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	747.232.075	Bakesbangpol dan PBD
		Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik		Bakesbangpol dan PBD
		Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	132.617.500	Bakesbangpol dan PBD
		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan		Bakesbangpol dan PBD

Rumusan rencana program dan kegiatan serta pendanaan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Blitar tahun 2022 dan proyeksi tahun 2023 adalah sebagaimana tabel berikut :

TABEL 4.2
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK TAHUN 2022
DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2023
KOTA BLITAR

Nama PD : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	Bakesbangpol	88,65	4.297.931.428				4.664.3200.000
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar		100 %	37.020.400				18.000.000
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah jenis dokumen perencanaan yang tersusun (RENSTRA, PK, RENAKSI, SPP, SOP, RENJA, RKA, DPA, PRKA, DPPA)		8 dokumen	8.510.200				9.000.000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah jenis dokumen pelaporan yang tersusun (LKJIP, LKPJ, LPPD, SKM, SPM, Evaluasi RKPD, Pengukuran kinerja tribulan, monev tribulan)		8 dokumen	18.510.200				9.000.000
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar		100 %	8.564.800				9.000.000
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang diberikan Gaji dan Tunjangan		24 ASN	3.475.425.228				3.650.000.000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah jenis dokumen laporan keuangan yang tersusun (Bulanan/Semesteran)		5 dokumen	8.564.800				9.000.000
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar		100 %	73.392.200				77.000.000
	Sosialisasi Peraturan Perundang - Undangan	Jumlah event daerah dan hari besar nasional yang diikuti		4 event	73.392.200				77.000.000
		Jumlah Publikasi Program/kegiatan Perangkat Daerah		3 jenis					
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar		100 %	443.272.200				635.600.000

RENCANA KERJA TAHUN 2022

				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	6 komponen	8.814.000				9.500.000
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang terpenuhi	0	173.897.300				350.000.000
					Jumlah perlengkapan gedung kantor yang terpenuhi (TERMASUK MEBELAIR)	1 jenis					
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah jenis peralatan rumah tangga kantor yang tersedia	28 jenis	16.234.700				17.100.000
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah dos/kotak makanan dan minuman yang tersedia	1020 dos	47.983.600				50.000.000
					Jumlah jenis alat tulis kantor yang tersedia	43 jenis					
				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang tersedia	8 cetakan	38.807.600				41.000.000
					Jumlah lembar penggandaan	28473 lembar					
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah bahan bacaan yang tersedia	3 bahan bacaan	7.440.000				8.000.000
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat rapat koordinasi dan konsultasi regional dan nasional yang diikuti	45 rakor	150.095.000				160.0000.000
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	100%	44.895.900				47.600.000
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening yang terbayarkan (termasuk Listrik, air, telepon, internet)	3 rekening	43.393.500				46.000.000
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah iuran kebersihan yang terbayarkan	12 kali	1.502.400				1.600.000
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar	100%	215.360.700				227.000.000
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas yang terbayarkan pajaknya	14 unit	87.879.900				92.500.000
					Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional terpelihara	5 unit					
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara (termasuk komputer, laptop, PC, printer, TV, Scanner, Kamera, Fax)	6 jenis	24.035.300				25.500.000
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah bangunan kantor yang terpelihara (termasuk pengecatan)	1 unit	81.880.000				86.000.000
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana	Jumlah jenis perlengkapan gedung kantor yang terpelihara (termasuk	3 jenis	21.565.500				23.000.000

RENCANA KERJA TAHUN 2022

				Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	AC, Exhaust fan, kipas angin yang menempel di dinding, mebelair)							
				PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase penurunan konflik keagamaan		100%	623.972.900				445.750.000
					Persentase kampung berkarakter Pancasila		9,5%					
				Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase pemahaman masyarakat yang mengikuti pembinaan ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan		81%	623.972.900				445.750.000
					Jumlah kampung berkarakter Pancasila		2					
				Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	1. Jumlah peserta pembinaan ideologi Pancasila		200 orang	348.972.900				367.000.000
					2. Jumlah Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) yang terfasilitasi		17 orang					
					3. Jumlah Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) yang terfasilitasi		21 orang					
					4. Jumlah peserta diklat bela negara		100 orang					
					5. Jumlah anggota korsik yang terfasilitasi		50 orang					
					6. Jumlah fasilitasi upacara Hari Bela Negara		100 orang					
					7. Jumlah fasilitasi pawai kebangsaan		0					
					8. Jumlah pembentukan Kampung berkarakter Pancasila		2 kampung					
				Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah dokumen indeks kerukunan umat beragama		1 dokumen	275.000.000				78.750.000
					Jumlah Lembaga yang mendapatkan hibah		2 lembaga					
				PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase partai politik yang aktif dalam pendidikan politik masyarakat		100%	747.232.075				211.000.000
				Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan,	Persentase pemahaman masyarakat yang mengikuti pendidikan politik		81%	747.232.075				211.000.000

RENCANA KERJA TAHUN 2022

				Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik								
				Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	1. Jumlah peserta sosialisasi pendidikan politik	200 orang	38.035.800					40.000.000
					2. Jumlah tim desk pemilu yang terfasilitasi	0						
					3. Jumlah petugas pemantau pemilu yang terfasilitasi	0						
					4. Jumlah jenis sarana dan prasarana pendukung pemilu yang terfasilitasi	0						
					5. Jumlah lembaga penyelenggara pemilu yang mendapatkan hibah	0						
				Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	1. Jumlah peserta pendidikan politik	120 orang	49.290.700					52.000.000
					2. Jumlah peserta peningkatan partisipasi perempuan dalam bidang politik	150 orang						
					3. Jumlah peserta peningkatan kapasitas kelembagaan politik	15 parpol						
				Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	1. Jumlah fasilitasi pengukuran IDI	1 dokumen	659.905.575					119.000.000
					2. Jumlah peserta peningkatan kualitas demokarasi	40 orang						
					3. Jumlah penerima hibah parpol	8 parpol						
				PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase organisasi kemasyarakatan yang aktif	65%	132.617.500					140.000.000
				Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase ormas aktif yang mengikuti pemberdayaan	72%	132.617.500					140.000.000

RENCANA KERJA TAHUN 2022

				Pelaksanaan Kebijakan di bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	1. Jumlah Peserta pembinaan dan pengawasan ormas	120 orang	132.617.500				140.000.000
					2. Jumlah peserta Pengelolaan sistem informasi ormas	120 orang					
					3. Jumlah peserta pemberdayaan ormas	30 ormas					
				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase masyarakat yang mendapatkan peningkatan kompetensi pembinaan sosial	76%	1.526.899.600				297.029.800
				Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya	Persentase masyarakat yang mengikuti sosialisasi	85%	276.899.600				297.029.800
				Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	1. Jumlah Fasilitasi Tim SATLAK pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika (P4GN)	3 kali	276.899.600				297.000.000
					2. Jumlah peserta sosialisasi pencegahan penyalahgunaan miras dan narkoba	75 orang					
					3. Jumlah Fasilitasi Tim Terpadu penanganan konflik sosial	4 kali					
					4. Jumlah fasilitasi pengamanan kegiatan daerah, keagamaan, tamu VVIP	3 posko					
					5. Jumlah petugas yang melaksanakan fasilitasi pencegahan penanganan konflik	1288 orang					
				Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Lembaga yang mendapatkan hibah	3 lembaga	1.250.000.000				29.800
				PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase potensi Konflik Sosial yang terselesaikan	100%	164.530.500				173.195.000
				Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Persentase laporan potensi konflik sosial yang ditindaklanjuti	100%	164.530.500				173.195.000

RENCANA KERJA TAHUN 2022

				Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	1. Jumlah peserta rakor tim kewaspadaan dini Pemerintah Daerah		90 orang	158.630.500				167.000.000
					2. Jumlah fasilitas FKDM Kota		4 kali					
					3. Jumlah fasilitas tim terpadu anti radikalisme		0					
				Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	1. Jumlah laporan kewaspadaan dan deteksi dini serta pengawasan orang asing di Kota Blitar		1 laporan	5.900.000				6.195.000
					2. Jumlah Lembaga pengaman pemilu yang mendapatkan hibah		0					

BAB V

PENUTUP

Mengingat dari uraian – uraian seperti tersebut pada bab – bab yang lalu dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan Badan komponen daerah yang mengemban tugas sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah, yang mempunyai tugas membantu Kepala Daerah (Walikota) dalam menentukan dan melaksanakan kebijaksanaan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.
2. Dalam pelaksanaan tugas harus berpedoman pada Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2022 yang aktivitasnya sesuai dengan rincian kegiatan dan realisasi kegiatan dengan tolok ukur aktualitas yang jelas dan dapat di pertanggungjawabkan.
3. Dalam melaksanakan tugas, walaupun Sarana dan Prasarana, dana, personil yang tersedia keluar sepenuhnya secara representatif mendukung terwujudnya Rencana Kinerja Tahun 2022, namun Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan semua jajaran terkait untuk berupaya mengoptimalkan pencapaian hasil dengan semaksimal mungkin sesuai dengan aspirasi yang berkembang di masyarakat pada saat ini.
4. Untuk merespon perkembangan tuntutan dan dinamika masyarakat Kota Blitar di era reformasi dan pelaksanaan otonomi Daerah, maka segala sesuatu yang menyangkut dengan aplikasi Rencana Kinerja Tahun 2022 di peruntukkan pada peningkatan pada pelayanan dan pemberdayaan masyarakat sehingga pada gilirannya peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat akan semakin terwujud lebih tepat sasaran.

Saran-saran yang diberikan dari penyusunan perubahan Renja tahun 2022 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai berikut:

1. Mengingat betapa strategis tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, maka sangat mengharapkan dukungan sesama pihak dari instansi terkait untuk saling mengembangkan jaringan komunikasi, koordinasi dan informasi yang lebih intensif.
2. Pada jajaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dapat melaksanakan visi dan misi Walikota periode 2022-2026.
3. Agar terwujudnya Rencana Kinerja Tahun 2022 yang telah ditetapkan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik maka kepada pihak yang berwenang memperhatikan dan mengupayakan tindak lanjut terhadap kegiatan – kegiatan yang telah diuraikan pada bab – bab terdahulu dan mandapatkan perhatian atas kesediaan dana sebagai pendukung tercapainya kinerja untuk mencapai sasaran sesuai Renstra OPD 2022 – 2026.

Blitar, 21 Juli 2021

Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik
Dan Penanggulangan Bencana Daerah
Kota Blitar



